



Tahun 2025

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas

<https://dppkh.sambas.go.id>



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2025 dapat disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Pedoman penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah. Ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan serta dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Sejalan dengan kondisi tersebut, LAKIP yang kami susun berusaha melaporkan program/kegiatan yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya, sejauhmana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas dan sekaligus sebagai wujud komitmen instansi serta aparatur di Lingkungan Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan



Hewan Kabupaten Sambas dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa LAKIP yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karenanya kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, meskipun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini masih memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap LAKIP yang disusun dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntabilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan “*Good Governance*” di Lingkungan Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sambas pada umumnya.

Sambas, Januari 2026

Kepala Dinas Perikanan, Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Sambas



HENDY WIJAYA, S.K.M., M.PH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690824 198911 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat daerah.....	1
B. Permasalahan Utama Organisasi.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis (<i>Renstra</i>) Tahun 2025-2029	12
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Perangkat daerah	20
B. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan Umum.....	31
B. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja.....	31



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sumberdaya Aparatur Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2025.....	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.....	16
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.....	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.....	18
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025.....	22
Tabel 3.2 Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya.....	23
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020-2025.....	24
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra Tahun 2020-2025.....	25
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025...	26
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	36



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.....	3



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan lokal yang baik (*good local governance*) diperlukan suatu media pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka visi, misi dan tujuan organisasi/ instansi pemerintah dipertanggungjawabkan secara transparan dan dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra. Pedoman penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, maka Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud.

A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Pendahuluan

Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas. Dalam kedudukannya sebagai sub sistem dalam Tata Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan, peternakan dan Kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.

2. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalami pembaharuan SOTK yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

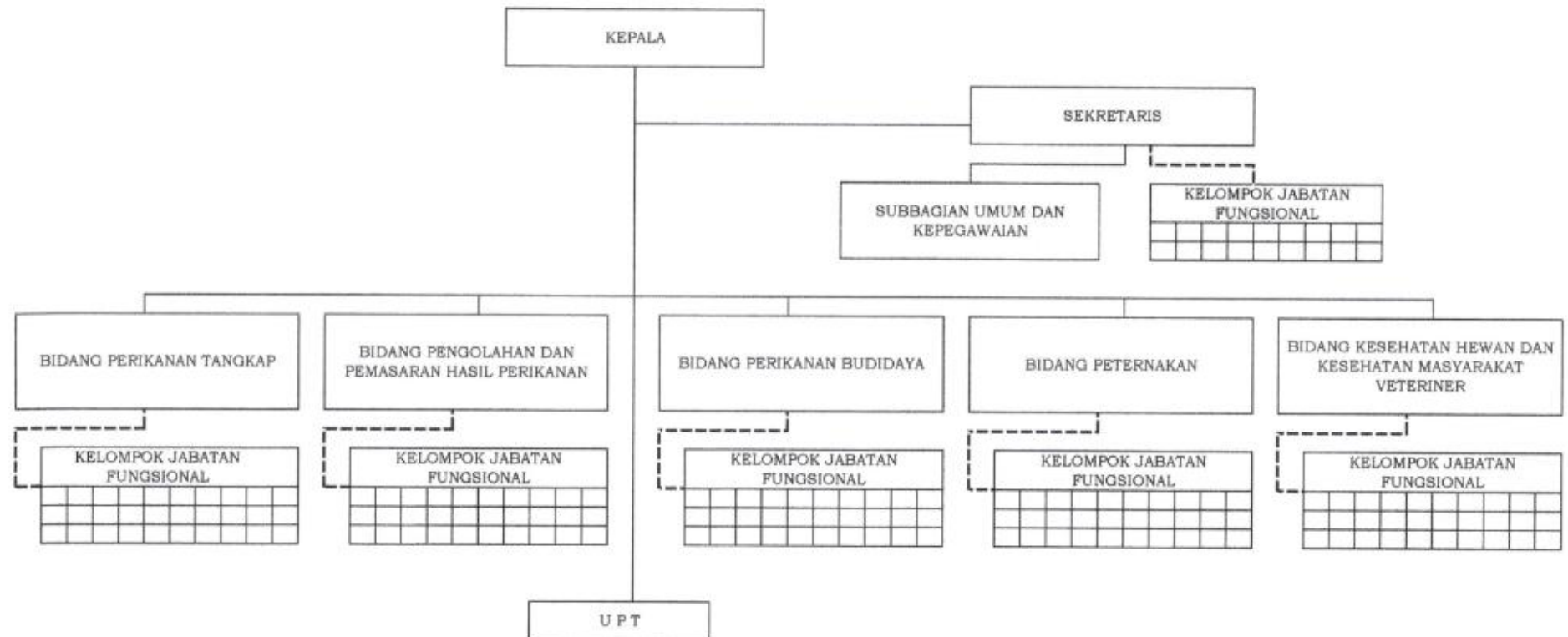
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Bidang Peternakan;
- g. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kondisi sumber daya manusia (SDM) aparatur, sarana dan prasarana kerja, sumber pendanaan dan lain-lain.



Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas





Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi RPJMD, dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kondisi sumber daya manusia (SDM) aparatur, sarana dan prasarana kerja, sumber pendanaan dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023, tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023, maka Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas mempunyai tugas antara lain :

- a. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok sesuai lingkup kewenangannya, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, peternakan dan Kesehatan hewan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



4. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 69 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sumberdaya Aparatur Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5
1	Hendy Wijaya, S.K.M., M.PH 19690824 198911 1 001	Pembina Utama Muda / IV.c	Kepala Dinas	S2
2	Junihardy, S.Pi 19760626 200212 1 010	Pembina Tk.I / IV.b	Sekretaris	S1
3	Makbullah, S.PT, MP 19720903 199803 1 009	Pembina / IV.a	Kabid Kesehatan Hewan dan Kesmavet	S2
4	Friyanto, S.Pt 19710215 199903 1 006	Pembina / IV.a	Kabid Peternakan	S1
5	Agus Ishardi, S.St.Pi 19790828 200604 1 007	Penata Tk.I /III.d	Kabid Perikanan Tangkap	D.IV
6	U. Azharie, S.Pi 19761010 200212 1 009	Pembina / IV.a	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	S1
7	Isnul Aprinda, S.Pi, MT 19800428 200502 1 002	Pembina / IV.a	Kabid Perikanan Budidaya	S2
8	Ahmad Pauji 19680709 199403 1 009	Penata Tk.I /III.d	Pengawas Perikanan	SLTA
9	Purwadi, S.ST 19740407 199403 1 004	Penata Tk.I /III.d	Medik Veteriner	D4
10	Hidayat, S.Pi 19721025 200312 1 004	Penata Tk. I/III d	Pengawas Perikanan	S1
11	Gusti Alimsyah, S.Pi 19710119 200312 1 006	Penata Tk. I/III d	Analisis Akuakultur	S1
12	M. Tommy Rizal, S.Pt 19751017 200502 1 002	Penata Tk. I/III d	Medik Veteriner	S1
13	Eka Martini, S.Pt 19790317 200502 2 002	Penata Tk.I /III.d	Pengawas Bibit Ternak	S1
14	Al Amrusi, S.Pi 19801014 200803 1 002	Penata Tk.I /III.d	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	S1



15	drh. Maria Gratia	Penata Tk.I /III.d	Medik Veteriner	S2
	19831006 200803 2 001			
16	Deli Daliyana, S.St.Pi	Penata Tk.I /III.d	Pengawas Perikanan	D4
	19790628 200312 2 006			
17	Adi Roja Suryo Pranoto, S.St.Pi 19760723 200312 1 006	Penata Tk.I /III.d	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	D4
18	Novi Priyanti, S.Pi 19851119 200902 2 005	Penata Tk.I /III.d	Pengelola Kesehatan Ikan	S1
19	Haliza, S.Pt 19810501 200902 2 005	Penata Tk.I /III.d	Pengawas Bibit Ternak	S1
20	Darmawansyah, S.IP 19780911 200312 1 009	Penata / III.c	Analisis Pengelolaan Keuangan	S1
21	Hamika, S.Hum 19820828 200701 1 008	Penata Muda Tk.I / III.b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
22	Hermani, S.H 19680513 200501 1 001	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengelola Barang Milik Daerah	S1
23	Kenedi, S.Hum 19730527 200312 1 003	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengawas Mutu Bibit Ternak	S1
24	Femy Chindi Rilau, S.P 19920206 201902 2 004	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengawas Mutu Bibit Ternak	S1
25	Subaktina 19670520 200604 2 009	Penata Muda / III.a	Pengadministrasi Perizinan	SLTA
26	Maulidi 19780612 200701 1 020	Penata Muda / III.a	Pengadministrasi Izin Usaha	SLTA
27	Sri Rahayu 19790209 200701 2 013	Penata Muda / III.a	Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA
28	Rully, S.P 19851008 200502 1 002	Penata Muda / III.a	Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan	S1
29	Imam Pratama, S.Pi 19910515 202012 1 007	Penata Muda / III.a	Analisis Perikanan Budidaya	S1
30	Adha Kurniawan, S.St.Pi 19900702 202203 1 002	Penata Muda / III.a	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	D.IV
31	Candra Roji, S.Pt 19950504 202203 1 003	Penata Muda / III.a	Pengawas Mutu Pakan	S1
32	Kamal 19821110 200701 1 009	Pengatur Tk. I / II.d	Bendahara Pengeluaran	SLTA
33	Supliadi 19720616 200801 1 012	Juru Tk.I / I.d	Pramu Kebersihan	SD
34	Afner	Juru Tk.I /	Pramu Bakti	SD



	19790722 200801 1 021	I.d		
35	Guruh Ertiyasa, S.Pi		Honorer	S1
36	Vindo Lesmana, S.Pt		Honorer	S1
37	Elwin, S.Pt		Honorer	S1
38	Ilham Ramananda, S.Pi		Honorer	S1
38	Sahni,S.Akun		Honorer	S1
39	Kurniawati, S.Tr.Ak		Honorer	D.IV
40	Sepriyadi, S.Tr.Pi		Honorer	D.IV
41	Bagus Pramuja, S.Tr.Pi		Honorer	D.IV
42	Alza Winalda, S.Tr.Pi		Honorer	D.IV
43	Yesi Agustini, A.Md		Honorer	D.III
44	Ria, A.Md		Honorer	D.III
45	Nazarhan, A.Md		Honorer	D.III
46	Alvi Maudi, A.Md		Honorer	D.III
47	Arie Pariyanto, A.Md		Honorer	D.III
48	Sri Mulyani, A.Md		Honorer	D.III
49	Tan Irfan, A.Md		Honorer	D.III
50	Dino Sariono, A.Md		Honorer	D.III
51	Rifky Surista, A.Md		Honorer	D.III
52	Raden Namira Kesuma, A.Md		Honorer	D.III
52	Deki Haryanto		Honorer	SLTA
54	Mualimnur		Honorer	SLTA
55	Muhammad Nopianto		Honorer	SLTA
56	Surya Mandiri Zed		Honorer	SLTA
57	Robiansyah		Honorer	SLTA
58	Egi Vebrianto		Honorer	SLTA
58	Nusi		Honorer	SLTA
60	Maulidin		Honorer	SLTA
61	Syukur		Honorer	SLTA
62	Wan Alam Nur Qomar		Honorer	SLTA
63	Agus Poniman		Honorer	SLTA
64	Agung Setyawan Waluyojati		Honorer	SLTA
65	Kasianus Buyung		Honorer	SLTA
66	Muhamad Nur		Honorer	SLTA
67	Harfendi		Honorer	SLTP
68	Apri Yono		Honorer	SLTP
69	Bambang		Honorer	SD



5. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana yang disediakan untuk penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan adalah sebesar Rp 20.620.601.114,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

6. Sarana dan Prasarana

Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kelancaran dalam penyelenggaraan tugas operasional, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kerja baik berupa barang tidak bergerak (gedung/kantor, ruang pertemuan, garasi dll) dan barang bergerak (sarana mobilitas/ kendaraan, komputer, audio visual, perlengkapan internet, brankas dll).

B. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

DPPKH Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh DPPKH Kabupaten Sambas adalah :

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
- b. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
- c. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dan banyaknya rencana kegiatan.
- d. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi,
- e. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur DPPKH yang masih perlu ditingkatkan.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana organisasi.



Untuk mengatasi masalah diatas, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
- b. Meningkatkan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
- c. Mengurangi kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dan banyaknya rencana kegiatan
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur DPPKH.
- f. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana organisasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis merupakan langkah awal dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja DPPKH pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Strategis ini disusun dengan menggabungkan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang meliputi penetapan tujuan, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif *stakeholder*, *internal bussiness process*, *learning* dan *growth* serta *finacials* sehingga mampu memenuhi keinginan *stakeholder* untuk bisa mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan dimasa depan, membangun operasi serta prosedur dalam mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya dengan menggunakan lima tolak ukur, antara lain masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) serta dampak (*impact*).

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefenisikan dalam suatu Rencana Strategis adalah pernyataan visi pembangunan daerah hanya dapat direalisasikan dalam bentuk misi pembangunan daerah yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan kedalam tujuan serta sasaran strategis DPPKH Kabupaten Sambas berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi khusus yang ingin dicapai oleh DPPKH Kabupaten Sambas dalam konsepsi yang lebih operasional dalam suatu strategi. Perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa program kegiatan ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis yang kemudian dijabarkan kedalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana capaian kinerja untuk satu tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran DPPKH Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strateginya.

Rencana Strategis DPPKH Kabupaten Sambas disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah, arah kebijakan serta prioritas daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan juga disertai



dengan indikator kegiatan berdasarkan bidang kewenangan dan arah kebijakan pembangunan. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan secara periodik perlunya upaya penyempurnaan/revisi baik secara parsial maupun menyeluruh jika ditemukannya suatu perubahan lingkungan strategis yang signifikan. Kondisi ini diperlukan agar mampu beradaptasi serta merespon terhadap suatu perkembangan yang begitu dinamis, baik pada aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Atas dasar pertimbangan Motto “Sambas Berkah Berkemajuan” serta visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006-2011), lima tahun kedua (tahun 2012- 2016), lima tahun ketiga (2016-2021), lima tahun keempat (2021-2026) serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029 adalah : “Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”.

1. Visi

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Bersama Kuatkan Langkah mencerminkan filosofi kerja yang menekankan kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan besar. Dalam dunia kerja, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian tiap individu adalah bagian dari rantai yang saling menguatkan. Seperti roda gigi yang bergerak selaras, kerja tim yang solid mampu mengatasi rintangan, mempercepat inovasi, dan menciptakan solusi yang lebih kuat. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan menyatukan visi, berbagi peran, dan saling mendukung, setiap langkah yang diambil akan lebih kokoh, penuh keyakinan, dan membawa dampak yang lebih luas. Berkah juga bisa dimaknai BERSinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan berkelanjutan. **Bersinergi** menekankan pentingnya kolaborasi, di mana setiap individu dan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar dari sekadar upaya individu. Yakni



Kemampuan membangun kolaborasi antar OPD, masyarakat, sektor swasta, dan institusi vertikal secara aktif dan fungsional. Adapun indikatornya adalah, pertama persentase program lintas sektor/OPD yang dilaksanakan secara kolaboratif tiap tahun. Kedua jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan mitra eksternal yang dijalankan secara aktif, utamanya nota kesepahaman untuk mendorong investasi dengan dunia usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, misalnya pada Musrenbang Desa dan Kabupaten. **Kompetitif** menjadi pendorong inovasi dan semangat juang, memastikan setiap langkah diambil dengan optimal dan penuh strategi. Yakni Meningkatkan daya saing daerah melalui kualitas SDM, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Prevalansi Stunting, Meningkatkan pembangunan Infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDRB Pendapatan perkapita, indikatornya meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM/IMM), Penurunan Prevalansi Stunting, Indeks Infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, PDRP Perkapita dan Penurunan tingkat kemiskinan. **Amanah** mencerminkan integritas dan tanggung jawab, baik dalam menjalankan tugas maupun menjaga kepercayaan yang diberikan. Yakni Tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik. Indikator ukuran meliputi Indeks Refomasi Birokrasi, Indeks Pemdi, Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). **Harmonis** menjadi kunci dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Yakni hubungan yang seimbang dan damai antar elemen masyarakat, agama, budaya, serta organisasi pemerintahan. Indikator Ukuran meliputi, Indeks kerukunan umat beragama (bisa mengacu pada data Kemenag), Jumlah konflik horizontal yang terjadi per tahun (target: menurun), Frekuensi kegiatan lintas budaya/agama yang difasilitasi pemerintah. Dengan mengintegrasikan keempat nilai ini, setiap individu dan organisasi dapat tumbuh bersama, menciptakan prestasi yang bermakna, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Adapun makna berkemajuan mempunyai makna: **Beriman** adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan



norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*good and clean Government*). **Kemandirian** adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. **Maju** adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2019- 2024). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah. **Berkelanjutan** adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD kabupaten/kota harus mempedomani RPJMD provinsi dan RPJMD provinsi harus mempedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan visi Kabupaten Sambas berpedoman pada visi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang disebut sebagai implementasi dari *asta cita*. Visi Kabupaten Sambas juga berpedoman pada visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kalimantan Barat Yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, Dan Berwawasan Lingkungan”.

2. MISI

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan 5 Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut :



1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan.
5. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui program prioritas dan pernyataan Misi ke 3 yaitu Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah.

Mengacu kepada visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta berdasarkan Renstra DPPKH Kabupaten Sambas tahun 2025-2029, maka DPPKH Kabupaten Sambas menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

c. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Adapun tujuan DPPKH Kabupaten Sambas adalah Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor-sektor Unggulan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan tujuan ditetapkanlah sasaran DPPKH Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan.
2. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, Indikator Kinerja yang ingin dicapai secara bertahap sampai akhir 2025 adalah :



1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%).
2. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%).



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Sambas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor-sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	46.990,29 Ton 61,68%	48.442,70 Ton 65,02%	49.386,07 Ton 67,05%	50.281,28 Ton 68,98%	50.882,50 Ton 70,27%
2		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)	6.982,72 Ton 17,00%	7.087,46 Ton 18,52%	7.193,77 Ton 20,07%	7.301,68 Ton 21,64%	7.411,20 Ton 23,23%



Sebagai aktualisasi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, untuk tahun 2025 dilaksanakan 9 (Sembilan) program utama yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Penendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9. Program Perizinan Usaha Pertanian

Lebih lanjut dalam pelaksanaan 9 (sembilan) program utama tersebut, dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan Sub Kegiatan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, DPPKH Kabupaten Sambas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala DPPKH Kabupaten Sambas Nomor 032 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS
1	2	3	4
1	Persentase Peningkatan produksi perikanan	Persentase Peningkatan produksi perikanan	$\left(\frac{(\text{Produksi Tahun } n - \text{Produksi Tahun } 0)}{\text{Produksi Tahun } 0} \times 100\% \right) + \text{Persentase Tahun } 0$
2	Persentase Peningkatan	Persentase Peningkatan	



	produksi peternakan	produksi peternakan	$\left(\frac{(\text{Produksi Tahun } n - \text{Produksi Tahun } 0)}{\text{Produksi Tahun } 0} \times 100\% \right) + \text{Persentase Tahun } 0$
--	---------------------	---------------------	---

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara Bupati Kabupaten Sambas dengan Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025 DPPKH Kabupaten Sambas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
DPPKH Kabupaten Sambas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Persentase Peningkatan produksi perikanan	Persentase Peningkatan produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	46.990,29 Ton (61,68%)
2.	Persentase Peningkatan produksi peternakan	Persentase Peningkatan produksi peternakan	6.982,72 Ton (17,00%)



NO	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.090.944.229
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	6.028.045.862
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	3.505.174.070
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp.	143.279.937
5.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil perikanan	Rp.	1.590.368.399
6.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	3.103.618.314
7.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	10.384.436
8.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	143.785.948
9.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.	4.999.919
	TOTAL	Rp.	20.620.601.114,00

Total anggaran DPPKH Kabupaten Sambas bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 20.620.601.114,00 atau 84,11% dari total anggaran saat penyusunan perjanjian kinerja sebesar Rp 24.515.942.086,00.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*, sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan



keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Bapperida Kabupaten Sambas belum dapat dilaksanakan secara lengkap mengingat lembaga ini masih memiliki keterbatasan personil serta masih minimnya kualitas personil. Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

Evaluasi kinerja diartikan sebagai proses untuk memperoleh umpan balik guna mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang, sehingga evaluasi kinerja mampu menunjukkan penyebab ketidakberhasilan ataupun kegagalan, serta cara-cara yang harus ditempuh untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan secara mandiri, yang meliputi analisis atas seluruh pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang mana hasil evaluasinya disajikan dalam Laporan Kinerja.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Akuntabilitas kinerja DPPKH Kabupaten Sambas dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja, (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta (3) akuntabilitas keuangan.

1. Target dan Realisasi Kinerja

Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia di DPPKH Kabupaten Sambas karena keberhasilan program dan kegiatan tersebut begitu tergantung dari sumber daya aparatur yang tersedia serta bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah yang berhasil guna dan berdaya guna.

DPPKH Kabupaten Sambas melaksanakan tugas-tugas urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian di segala sektor didukung dana yang



berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis DPPKH Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Kinerja
1	Persentase Peningkatan produksi perikanan	Persentase Peningkatan produksi perikanan	46,990,29 Ton 61,68%	53.939,35 Ton 146,11%	112,41%
2	Persentase Peningkatan produksi peternakan	Persentase Peningkatan produksi peternakan	6.982,72 Ton 17,00%	5.523,2 Ton -5.18%	79,10%

Dari tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi capaian produksi tahun berkenaan dengan target produksi tahun berkenaan, sehingga didapatkan persentase kinerja pada setiap sasaran staregis. Hal ini dapat dilihat pada sasaran strategis pertama yakni Persentase Peningkatan produksi perikanan mempunyai capaian kinerja 112,41% dengan kategori Sangat Berhasil. Sedangkan pada sasaran strategis kedua yakni Persentase Peningkatan produksi peternakan mempunyai capaian kinerja sebesar 79,10% dengan kategori Kurang Berhasil.

Adapun persentase peningkatan produksi perikanan pada tahun 2025 ialah 112,41% dengan realisasi produksi sebesar 53.939,35 Ton, lebih tinggi jika dibandingkan target persentase peningkatan produksi perikanan yaitu sebesar 61,68% dan target produksi sebesar 46,990,29 Ton. Tingginya realisasi capaian produksi perikanan didukung oleh tingginya jumlah produksi di sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sedangkan persentase peningkatan produksi peternakan pada tahun 2025 ialah sebesar -5.18%, lebih rendah jika dibandingkan target persentase peningkatan produksi peternakan sebesar 17.00%.



Tabel 3.2

Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja Tahun 2025	Tingkat Efisiensi
			Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025		
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.090.944.229	6.003.119.185	100,00%	98,56%
		Program pengelolaan perikanan tangkap	6.028.045.862	5.983.333.631	223,58%	99,26%
		Program pengelolaan perikanan budidaya	3.505.174.070	3.488.166.724	134,40%	99,51%
		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	143.279.937	143.200.359	100%	99,94%
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.590.368.399	1.510.399.831	54,15%	94,97%
2	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.103.618.314	2.376.545.921	78%	76,57%
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	10.384.436	10.384.436	100%	100%
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	143.785.948	137.980.932	100%	95,96%
		Program perizinan usaha pertanian	4.999.919	4.999.919	100%	100%



2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran strategis DPPKH selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2020-2025

No	Sasaran Strategis	IKU	Target Per Tahun (dalam Ton)				Realisasi Per Tahun (dalam Ton)				Persentase Kinerja (%)			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	23.830,00	24.100,00	24.370,00	46.990,29	42.088,07	39.564,95	53.218,99	52.820,76	176,62%	164,17%	218,38%	112,41%
2	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	6.670,00	6.747,00	6.819,00	6.982,72	6.637,26	6.939,63	6.802,62	5.523,20	99,51%	102,86%	99,76%	79,10%



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra Tahun 2020-2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Anggaran (Renstra)					2025	Anggaran (DPA)					Target Akhir RPJMD / Renstra	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1	Meningkatnya Produksi Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan)	Persentase Peningkatan produksi perikanan (Tangkap, Budidaya dan Pengolahan)	13.810.998.000	14.611.734.000	15.433.095.075	16.324.356.314	17.102.701.622	19.027.290.011	6.194.589.691	14.994.903.550	13.982.822.981	15.277.879.554	16.220.578.514	20.620.601.114	19.027.290.012
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan produksi peternakan													



Selain pengukuran capaian kinerja strategis, DPPKH Kabupaten Sambas juga melakukan pengukuran kinerja terhadap program yang dilaksanakan selama tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tingkat pencapaian kinerja program DPPKH Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Program
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100,00%	100,00%	100,00%
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	43.423,29	49.400,39	113,76%
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.400	3.420,38	100,60%
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang Dibina	3 POKMASWAS / Tahun	3 POKMASWAS / Tahun	100,00%
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	55,67	31,87	57,25%
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	6.982,72	5.523,20	79,10%
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio Kelompok Penerima Manfaat Prasarana Peternakan	20%	20%	100,00%
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	60%	60%	100,00%
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha / NIB)	20%	20%	100,00%

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja program DPPKH Kabupaten Sambas selama tahun 2025 ialah sebesar 109% dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 2 program memiliki capaian kinerja di atas 100%, yaitu Program Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Namun terdapat 2 program memiliki capaian kinerja di



bawah 100%, yaitu Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian. Tidak tercapainya indikator Jumlah Produksi Pengolahan pada Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan disebabkan oleh panjangnya musim hujan di tahun 2025 sehingga masyarakat kesulitan menjemur hasil olahan ikan. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya jumlah produksi pengolahan hasil perikanan. Sedangkan tidak tercapainya target Jumlah Populasi Ternak pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Terjadinya penurunan angka pemotongan pada ternak karena menurunnya permintaan daging segar.



4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

a. Hambatan dan Kendala

Sasaran strategis Persentase Peningkatan Produksi Perikanan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian produksi pada tahun 2024 yaitu sebesar 218,38% dan capaian produksi tahun 2025 sebesar 112,41%. Hal ini dikarenakan dari sektor Pengolahan perikanan pengukuran yang dilakukan adalah Angka Konsumsi ikan sehingga jumlah produksi pengolahan perikanan tidak di tambahkan dalam produksi perikanan secara keseluruhan, selain itu dari perikanan tangkap, produksi ubur ubur tidak ada produksi. Adapun realisasi jumlah produksi perikanan tahun 2025 ialah sebesar 52.820,76 Ton, lebih tinggi jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2025 sebesar 46.990,29 Ton.

Sasaran strategis Persentase Peningkatan produksi peternakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni dari 99,76% menjadi 79,10%. Realisasi produksi peternakan pada tahun 2025 ialah sebesar 5.523,20 Ton, lebih rendah jika dibandingkan dengan target produksi sebesar 6.896 Ton. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa factor, antara lain: 1. Perhitungan angka produksi 2025 berbeda dari tahun sebelumnya, untuk tahun 2025 data yang digunakan bersumber dari Isikhnas (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) dimana data diperoleh dari laporan petugaspada 6 lokasi / kecamatan sehingga data pemotongan untuk local / kecamatan lainnya tidak masuk dalam laporan angka produksi. 2. Beralihnya pola konsumsi daging. Penjualan daging beku yang semakin mudah didapat, dengan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan daging segar membuat masyarakat lebih memilih untuk membeli daging beku. Hal ini menyebabkan peternak mengalami kesulitan dalam menjual ternaknya sehingga membatasi jumlah ternak yang dipelihara.

b. Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala

Sebagai upaya pemecahan masalah dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan intervensi berupa pemberian Hibah Barang kepada nelayan dan pelaku pengolahan di Kabupaten Sambas,



seperti mesin, alat tangkap, sarana dan prasarana tangkap, dan sarana parsaran pengolahan.

Selain itu, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan juga berupaya untuk terus mengusulkan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah Pusat agar Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mengkoordinir setiap usulan hasil Musrenbang RKPD di Kabupaten Sambas, serta juga terus berupaya mensikronisasi kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD dengan Program Unggulan yang ada pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa kegiatan yang diusulkan melalui musrenbang RKPD Kabupaten diserahkan ke Pemerintah Provinsi untuk ditindaklanjuti karena memang kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengampu kegiatan tersebut.

B. Realisasi Anggaran

Penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 19.658.130.938,00 atau sebesar 95,33% dari total anggaran Rp 20.620.610.114,00. Dengan demikian penggunaan anggaran APBD dalam pencapaian strategis dinilai sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.090.944.229	6.003.119.185	98,56%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.028.045.862	5.983.333.631	99,26%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.505.174.070	3.488.166.724	99,51%
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	143.279.937	143.200.359	99,94%
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.590.368.399	1.510.399.831	94,97%



6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.103.618.314	2.376.545.921	76,57%
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.384.436	10.384.436	100,00%
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	143.785.948	137.980.932	95,96%
9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	4.999.919	4.999.919	100,00%
	TOTAL	20.620.601.114	19.658.130.938	96,09%



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tingkat pencapaian strategis Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas tahun 2025 dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, jika diambil rata-rata persentase maka capaian kinerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah sebesar 70,46% dengan kategori Sangat Berhasil.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi DPPKH Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar dalam memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Sambas.

B. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas tahun berikutnya diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja, terutama pada indikator kinerja yang capaiannya belum optimal. Peningkatan produksi perikanan dan peternakan merupakan tantangan bagi Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan perikanan dan peternakan di pusat-pusat sentra dan terintegrasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut meningkat dan berpengaruh terhadap peningkatan produksi perikanan dan peternakan.
2. Meningkatkan jumlah Percontohan perikanan baik di media pemeliharaan di Kolam, KJA dan Tambak.
3. Meningkatkan cara budidaya ikan yang baik dan secara intensif dengan penerapan pembudidayaan ikan secara Modern.



4. Meningkatkan perluasan wilayah pemanfaatan lahan Tambak dengan menggunakan metode Pemeliharaan secara intensif.
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendataan Produksi Perikanan dan Peternakan dilapangan dengan meningkatkan Kinerja Penyuluh Lapangan dan Petugas Enumerator agar data yang disampaikan akurat dan terwakili disetiap Wilayah yang potensi menghasilkan Produksi Perikanan dan Peternakan.
6. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM perikanan dan peternakan melalui diklat/bimtek.
7. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana perikanan dan peternakan sesuai kebutuhan yang diusulkan oleh pembudidaya ikan dan peternakan.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP DPPKH Kabupaten Sambas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja DPPKH Kabupaten Sambas memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sitem perencanaan pembangunan. Peran serta seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dalam proses perencanaan pembangunan merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sambas.

Akhir kata, semoga LAKIP tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan dapat menjadi sumber informasi penting dalam penyusunan LAKIP di tingkat Pemerintah Kabupaten Sambas.

Sambas, Januari 2026

Kepala Dinas Perikanan, Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Sambas



FHENDY WIJAYA, S.K.M., M.PH
Pembina Utama Muda

NIP. 19690824198911 1 001